

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA WAIHERU KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, KOTA AMBON

Oleh:

Suleman Watianan<sup>1)</sup>, Clemantina. Oh. M. Rumlus<sup>2)</sup>

Email: [Sulemanwatianan19mei62@gmail.com](mailto:Sulemanwatianan19mei62@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, dan mobilisator dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi proses tersebut. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman, penelitian ini melibatkan sepuluh informan kunci dari unsur birokrasi desa hingga representasi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi regulasi melalui sosialisasi kebijakan tingkat atas dan pemanfaatan kearifan lokal *Kewang*, namun masih terkendala oleh ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) yang definitif. Dalam peran fasilitator, pemerintah menyediakan dukungan administratif dan bibit tanaman, meskipun bantuan modal fisik bagi masyarakat masih dinilai terbatas. Fungsi mobilisator terimplementasi secara aktif melalui aksi penanaman massal yang melibatkan kelompok pemuda, namun aspek pengawasan terhadap limbah domestik dan penebangan liar belum mencapai tingkat optimal. Faktor koordinasi antar-lembaga menjadi kekuatan pendukung utama, sementara rendahnya kesadaran ekologis warga non-pesisir serta belum tersedianya regulasi lokal yang mengikat menjadi hambatan signifikan dalam upaya pelestarian yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Peran Pemerintah Desa, Pengelolaan Mangrove, Pesisir, Desa Waiheru.*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peran pemerintah desa dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya ekosistem hutan mangrove, merupakan instrumen strategis yang mendapatkan perhatian luas baik dalam diskursus nasional maupun internasional. Sebagai unit pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan dinamika akar rumput, pemerintah desa memegang kunci keberhasilan atas setiap upaya penataan, pemeliharaan, dan pelestarian lingkungan pesisir. Keberhasilan tata kelola ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah desa mampu memposisikan dirinya secara optimal dalam tiga fungsi utama, yakni sebagai regulator, fasilitator, dan mobilisator. Tanpa adanya integrasi yang kuat antara ketiga peran ini, upaya pelestarian mangrove akan kehilangan arah dan gagal mencapai tujuan kesejahteraan bersama bagi warga masyarakat.

---

<sup>1)</sup> Suleman Watianan: *Dosen Prodi. Sosiologi Fak. FISIP Unpatti Ambon*

<sup>2)</sup> Clemantina. Oh. M. Rumus, *Dosen Prodi. Fak. FISIP Unpatti Ambon*

Secara ekologis, hutan mangrove merupakan sistem ekologi yang kompleks, terdiri dari komunitas tumbuhan tropis yang didominasi oleh pohon-pohon bakau yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi di wilayah pantai berlumpur. Ekosistem ini berfungsi sebagai benteng alami pantai yang menjaga stabilitas garis pantai dari ancaman abrasi, polusi udara, hingga gelombang badai. Lebih jauh lagi, mangrove berperan sebagai daerah tujuan akhir bagi partikel organik dan endapan lumpur dari hulu, serta menjadi habitat krusial bagi berbagai biota laut seperti ikan, udang, dan kerang. Proses dekomposisi serasah mangrove oleh bakteri dan fungi menghasilkan nutrisi esensial yang mendukung rantai makanan fauna akuatik, menjadikannya area pemijahan dan asuhan bagi spesies yang memiliki nilai ekonomi penting.

Secara ekonomi dan sosial-budaya, hutan mangrove memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat. Kayu bakau dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pewarna, sementara keberadaan fauna akuatik di dalamnya menjadi sumber protein hewani dan penghidupan bagi nelayan. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai area konservasi yang menyimpan identitas budaya lokal serta memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam yang berkelanjutan.

Namun, kondisi hutan mangrove di Indonesia saat ini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Dari total luas ekosistem mangrove nasional yang mencapai 4.251.011 hektar, lebih dari separuhnya dilaporkan dalam kondisi rusak parah. Kerusakan ini dipicu oleh tiga faktor utama: pencemaran (minyak dan logam berat), konversi lahan yang tidak memperhatikan faktor lingkungan (untuk tambak, industri, infrastruktur, atau perkotaan), serta praktik penebangan yang berlebihan. Degradasi ini tidak hanya mengancam biodiversitas, tetapi juga meruntuhkan ketahanan wilayah pesisir terhadap bencana alam.

Fenomena degradasi ini juga ditemukan di Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon. Desa yang secara geografis membujur sepanjang jalan utama Kota Ambon ini memiliki potensi hutan mangrove seluas kurang lebih 11,3925 hektar. Meskipun memiliki keragaman spesies yang cukup tinggi, ekosistem mangrove di Desa Waiheru menghadapi tekanan eksternal yang signifikan dari aktivitas rumah tangga, konstruksi, dan pertanian. Sebagai desa pesisir yang terletak di bagian utara Teluk Ambon Dalam, keberadaan mangrove di Waiheru sangat krusial untuk mencegah banjir dan abrasi pantai.

Urgensi peran pemerintah desa dalam mengelola mangrove di Waiheru ditegaskan oleh mandat hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Dalam kapasitasnya sebagai pemangku kepentingan terdekat, pemerintah desa wajib menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi, pengetahuan, dan motivasi.

Sebagai mobilisator, pemerintah desa harus mampu menumbuhkan kesadaran mendalam bagi warga agar mereka terlibat aktif dalam penanaman anakan pohon bakau dan penjagaan dari tindakan pengrusakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sebagai fasilitator, pemerintah desa dituntut untuk memediasi pengembangan potensi wisata, mengatur infrastruktur, dan mempromosikan keindahan ekosistem lokal. Sementara sebagai regulator, pemerintah desa memiliki

---

<sup>1)</sup> Suleman Watianan: *Dosen Prodi. Sosiologi Fak. FISIP Unpatti Ambon*

<sup>2)</sup> Clemantina. Oh. M. Rumus, *Dosen Prodi. Fak. FISIP Unpatti Ambon*

wewenang untuk menyusun aturan lokal yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga kelestarian hutan dari ancaman eksploitasi berlebihan.

Meskipun fungsi-fungsi tersebut telah teridentifikasi secara teoritis, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove di Desa Waiheru belum berjalan optimal. Masih terdapat hambatan berupa terbatasnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarpihak terkait. Dinamika inilah yang mendorong pentingnya dilakukan penelitian mendalam untuk menganalisis efektivitas peran pemerintah desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses pengelolaan hutan mangrove di wilayah tersebut.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua poin utama:

1. Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam upaya menggerakkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove di Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas peran pemerintah desa dalam proses pengelolaan hutan mangrove di Desa Waiheru tersebut?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini memiliki fokus yang tajam dan mendalam, maka pembahasan dibatasi pada analisis terhadap peran pemerintah desa (regulator, fasilitator, mobilisator) serta identifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi upaya pelestarian mangrove di kawasan pesisir Desa Waiheru saja.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif gambaran mengenai peran pemerintah desa sebagai penggerak utama dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Waiheru.
2. Untuk mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pelestarian lingkungan tersebut.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Pengelolaan Hutan Mangrove**

Pengelolaan secara etimologis berakar dari kata *management* yang merujuk pada proses pengendalian atau penanganan suatu hal demi mencapai tujuan tertentu. Secara terminologi, pengelolaan merupakan aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang direncanakan untuk mencapai target kolektif. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengelolaan ekosistem mangrove telah diatur secara rigid melalui berbagai instrumen regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, serta Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 mengenai Batas Pantai.

---

<sup>1)</sup> Suleman Watianan: *Dosen Prodi. Sosiologi Fak. FISIP Unpatti Ambon*

<sup>2)</sup> Clemantina. Oh. M. Rumus, *Dosen Prodi. Fak. FISIP Unpatti Ambon*

Efektivitas pengelolaan sangat bergantung pada penerapan fungsi-fungsi manajemen. Henry Fayol mengemukakan lima fungsi utama yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pemberian perintah), *coordinating* (pengkoordinasian), dan *controlling* (pengawasan). Sejalan dengan hal tersebut, George R. Terry menyederhanakannya menjadi empat fungsi: *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Dalam tataran praktis, pengelolaan mangrove bertujuan agar seluruh potensi—baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana—dapat dioptimalkan secara efisien untuk mengatasi berbagai hambatan lingkungan.

## 2.2 Teori Peranan dan Pemerintah Desa

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, peranan mencakup norma-norma yang membimbing perilaku individu dalam posisi sosial tertentu, serta menjadi konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu atau lembaga dalam masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah dipahami sebagai organisasi yang memiliki otoritas untuk menciptakan dan menerapkan hukum di wilayah tertentu.

Peran pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama menurut Dwijowijoto dan Wrihatnolo:

1. **Fasilitator:** Pemerintah desa berperan menyediakan sarana dan prasarana, menjembatani kepentingan masyarakat, serta mendorong kolaborasi antarpihak melalui pemberian informasi, motivasi, dan mediasi.
2. **Mobilisator:** Pemerintah desa berfungsi menggerakkan partisipasi aktif warga dalam upaya penataan, penjagaan, dan pemeliharaan hutan mangrove guna menjamin kelestarian ekosistem.
3. **Regulator:** Pemerintah desa menyiapkan arah kebijakan melalui penerbitan aturan lokal yang selaras dengan kebijakan pusat untuk mencegah kerusakan hutan akibat aktivitas manusia yang eksploitatif.

## 2.3 Ekosistem Hutan Mangrove: Fungsi dan Manfaat

Hutan mangrove didefinisikan sebagai komunitas tumbuhan pantai yang tumbuh di wilayah dengan kadar salinitas tinggi dan kondisi tanah yang anaerobik. Secara ekologis, mangrove berfungsi sebagai penyangga alami terhadap bencana badai dan banjir, pelindung garis pantai dari abrasi, serta habitat krusial bagi berbagai biota laut seperti ikan dan krustasea. Selain itu, mangrove memiliki peran vital dalam mitigasi perubahan iklim global melalui kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon dioksida dalam jumlah besar.

Dari aspek ekonomi, ekosistem ini menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat lokal, baik melalui sektor perikanan, penyediaan bahan bakar, maupun pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.

## 2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan

Keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola hutan mangrove dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan:

- **Kesadaran Masyarakat:** Pengetahuan dan pemahaman warga akan pentingnya pelestarian lingkungan menjadi determinan utama. Tingginya

---

<sup>1)</sup> Suleman Watianan: *Dosen Prodi. Sosiologi Fak. FISIP Unpatti Ambon*

<sup>2)</sup> Clemantina. Oh. M. Rumus, *Dosen Prodi. Fak. FISIP Unpatti Ambon*

kesadaran kolektif akan mempermudah implementasi inisiatif pemerintah desa.

- **Kebijakan Pemerintah:** Adanya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat maupun daerah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk bertindak.
- **Koordinasi:** Sinkronisasi yang teratur antar-lembaga dan komunikasi yang efektif melalui forum formal sangat menentukan kelancaran program di lapangan.

## 2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian relevan menjadi acuan dalam studi ini. Rayanaldus (2019) dalam studinya di Desa Nangadhero menemukan bahwa peran pemerintah daerah telah berjalan baik dalam fungsi layanan dan pemberdayaan, namun masih terdapat kelemahan pada aspek regulasi di tingkat lokal. Sementara itu, penelitian Tantri (2020) di Kecamatan Bontoharu menekankan bahwa meskipun strategi pengadaan bibit dan penyuluhan telah dilakukan, pengelolaan secara menyeluruh belum tercapai karena kondisi geografis yang tersebar. Ikrimah Auliah (2018) menyoroti bahwa pembentukan kelompok tani hutan merupakan strategi efektif dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, meskipun kendala pendanaan seringkali menjadi hambatan utama. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini berfokus secara spesifik pada dinamika peran pemerintah desa di wilayah Desa Waiheru, Kota Ambon.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan **metode deskriptif kualitatif** yang diarahkan pada penarikan kesimpulan melalui uraian kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjelaskan fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kehidupan masyarakat dan pengelolaan lingkungan tanpa menggunakan representasi angka. Lokasi penelitian ditetapkan secara spesifik di Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, yang merupakan salah satu wilayah strategis dengan potensi ekosistem mangrove. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini dijadwalkan berlangsung dalam kurun waktu tiga bulan.

Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian ini melibatkan 10 orang informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan mereka terhadap situasi dan latar belakang permasalahan di lokasi penelitian. Komposisi informan tersebut mencakup Kepala Desa dan Sekretaris Desa, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengelola BUMDes Waiheru, serta empat orang perwakilan kepala keluarga dari masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dikategorikan menjadi data primer yang diperoleh langsung dari informan di lokasi penelitian, serta data sekunder yang mencakup arsip pemerintahan desa, catatan lapangan, foto lokasi mangrove, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dijalankan melalui tiga prosedur utama, yakni **observasi, wawancara, dan dokumentasi**. **Observasi** dilakukan secara sistematis dan konseptual untuk mengamati gejala-gejala terkait peran pemerintah desa dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Pantai Desa Waiheru. Metode **wawancara (interview)** digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dan ide antara peneliti dan informan guna mengonstruksikan makna yang mendalam mengenai topik yang

<sup>1)</sup> Suleman Watianan: *Dosen Prodi. Sosiologi Fak. FISIP Unpatti Ambon*

<sup>2)</sup> Clemantina. Oh. M. Rumus, *Dosen Prodi. Fak. FISIP Unpatti Ambon*

diteliti. Selain itu, teknik **dokumentasi** berfungsi sebagai pelengkap untuk menghimpun catatan peristiwa masa lalu dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan **model interaktif dari Miles dan Huberman (1984)** yang terdiri dari empat tahapan terintegrasi. Tahap pertama adalah **pengumpulan data** dari sumber primer dan sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan **reduksi data** untuk menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari catatan lapangan. Setelah data difokuskan, dilakukan **penyajian data** dalam bentuk teks naratif, tabel, atau grafik guna memungkinkan penarikan kesimpulan. Tahap akhir adalah **penarikan kesimpulan atau verifikasi**, di mana peneliti merumuskan konklusi akhir berdasarkan hasil olah data untuk menjawab permasalahan penelitian secara ilmiah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Singkat dan Etimologi Desa Waiheru

Secara etimologis, nama **Waiheru** berasal dari penggabungan dua kata dalam bahasa lokal, yaitu "**Wai**" yang berarti air dan "**Heru**" yang berarti kabur atau keruh. Penamaan ini merujuk pada realitas historis wilayah tersebut sebagai sentral penghasil air sageru (nira dari pohon mayang atau enau) yang memiliki karakteristik warna keputihan atau keruh. Secara kronologis, kawasan ini diperkirakan mulai dihuni pada pertengahan abad ke-17 oleh kelompok migran dari Kepulauan Lease dan negeri-negeri adat di Pulau Ambon yang datang untuk bekerja sebagai penokok sagu dan perajin sageru. Seiring dengan transformasi Ambon menjadi kota pelabuhan, para pendatang ini menetap secara permanen dan membentuk perkampungan yang dikenal sebagai Kampong Waiheru.

Dahulu, wilayah ini berada di bawah administrasi Pemerintahan Negeri Halong. Namun, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, berdasarkan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979**, Waiheru ditetapkan sebagai desa otonom pada tahun 1983 dan kemudian disahkan menjadi desa definitif oleh Pemerintah Kota Ambon. Hingga periode penelitian ini, kepemimpinan desa telah berjalan melalui lima masa jabatan, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Usman Ely, SP (periode 2020–sekarang).

#### 2. Kondisi Geografis, Topografi, dan Geologi

Desa Waiheru terletak di wilayah administrasi Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan luas wilayah mencapai **2.250 Ha**. Batas-batas administrasinya meliputi Petuanan Negeri Hitu di sebelah Utara, Teluk Ambon Dalam di Selatan, Desa Hunuth di Barat, dan Desa Nania di Timur. Kondisi fisik daratannya sangat variatif; wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah dengan kemiringan di bawah 2 derajat, sementara wilayah bagian utara didominasi perbukitan dengan kemiringan rata-rata 7 hingga 10 derajat.

Kondisi topografi ini menyebabkan wilayah selatan, terutama di sekitar bantaran sungai seperti RT 016, menjadi kawasan yang sangat **rawan terhadap bencana banjir** akibat meluapnya debit sungai yang bertepatan dengan fenomena pasang air laut. Dari perspektif geologi, wilayah ini tersusun atas batuan tua berumur Pra-Tersier yang disebut **Sekis Kristalin**, dengan karakteristik tanah

<sup>1)</sup> Suleman Watianan: *Dosen Prodi. Sosiologi Fak. FISIP Unpatti Ambon*

<sup>2)</sup> Clemantina. Oh. M. Rumus, *Dosen Prodi. Fak. FISIP Unpatti Ambon*

berupa lempung pasir berwarna hitam di dataran rendah dan lempung berliat berwarna kuning di wilayah perbukitan.

### 3. Kondisi Hidrologi dan Permasalahan Lingkungan

Terdapat empat aliran sungai utama yang membelah Desa Waiheru dari Utara ke Selatan, yakni Wai Salak (2 km), Wai Napu (2 km), Wai Heru (2 km), dan Wai Ila (1 km). Saat ini, keempat sungai tersebut menghadapi tantangan lingkungan yang serius berupa sedimentasi tinggi yang dipicu oleh aktivitas pertanian berpindah-pindah dan penambangan galian golongan C di bagian hulu. Hal ini mengakibatkan terjadinya pendangkalan alur sungai yang memicu luapan air ke pemukiman warga saat intensitas hujan tinggi.

### 4. Keadaan Demografi dan Sosial Ekonomi

Pertumbuhan penduduk Desa Waiheru menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2021 tercatat sebanyak **15.497 jiwa** yang terbagi dalam 4.078 Kepala Keluarga (KK). Dari sisi komposisi agama, penduduk desa didominasi oleh penganut agama Islam, diikuti oleh Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha, yang didukung oleh ketersediaan fasilitas ibadah berupa 14 unit masjid dan 2 unit gereja.

Dalam aspek pendidikan, terdapat kemajuan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan jumlah lulusan Sarjana (S1) menjadi 588 orang dan Magister (S2) sebanyak 80 orang pada tahun 2021. Namun, dari sisi mata pencaharian, mayoritas penduduk bekerja sebagai anggota **TNI/POLRI (747 orang)**, wiraswasta, dan pensiunan, sedangkan penduduk yang berprofesi sebagai **nelayan hanya berjumlah 22 orang**. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Waiheru adalah desa pesisir, ketergantungan ekonomi langsung terhadap sumber daya laut relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor formal lainnya.

#### 4.2 Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Mangrove

Penelitian ini menganalisis peran pemerintah desa melalui tiga dimensi fungsional: regulator, fasilitator, dan mobilisator. Identitas informan dalam penelitian ini melibatkan individu dengan rentang usia produktif (25-37 tahun) dan latar belakang pendidikan tinggi (75%).

##### 1. Peran sebagai Regulator

Fungsi regulator berkaitan dengan kapasitas pemerintah desa dalam menciptakan kepastian hukum melalui regulasi lokal. Berdasarkan hasil wawancara:

- a. **Perancangan Peraturan Desa (Perdes):** Hingga saat ini, regulasi khusus mengenai mangrove masih dalam **tahap perancangan dan belum diresmikan**. Kepala Desa mengakui bahwa saat ini implementasi aturan masih mengacu pada undang-undang tingkat atas dan ketentuan dari dinas terkait.
- b. **Sosialisasi dan Penegakan:** Pemerintah desa berupaya meningkatkan kesadaran warga melalui pemasangan spanduk dan papan larangan penebangan pohon serta pembuangan sampah di kawasan lindung.
- c. **Kearifan Lokal:** Keberadaan lembaga adat **Kewang** dimanfaatkan sebagai instrumen penjaga hutan mangrove dari kerusakan dan penyerobotan lahan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

<sup>1)</sup> Suleman Watianan: *Dosen Prodi. Sosiologi Fak. FISIP Unpatti Ambon*

<sup>2)</sup> Clemantina. Oh. M. Rumus, *Dosen Prodi. Fak. FISIP Unpatti Ambon*

## 2. Peran sebagai Fasilitator

Dalam kapasitas sebagai fasilitator, pemerintah desa memberikan kemudahan akses dan sarana penunjang bagi masyarakat:

- a. **Dukungan Pendidikan:** Memberikan izin operasional bagi lembaga pendidikan untuk melakukan kegiatan observasi dan penelitian di kawasan pesisir mangrove.
- b. **Pemberian Sarana:** Penyediaan bibit mangrove bagi kelompok pembudidaya dan rencana pembangunan infrastruktur wisata, seperti lapak jualan untuk UMKM serta lampu penerangan jalan di sepanjang pantai pesisir.
- c. **Hambatan Fasilitasi:** Sebagian perwakilan masyarakat merasa dukungan fisik masih kurang memadai dan berharap adanya pemberian bantuan barang atau dana yang lebih intensif daripada sekadar izin administratif.

## 3. Peran sebagai Mobilisator

Fungsi mobilisasi bertujuan menggerakkan partisipasi aktif warga dalam upaya konservasi nyata:

- a. **Kegiatan Rehabilitasi:** Pemerintah desa secara rutin menyelenggarakan penanaman massal yang melibatkan Karang Taruna dan komunitas lokal, seperti aksi **penanaman seribu lima ratus pohon** mangrove.
- b. **Pengawasan Kolaboratif:** Melibatkan unsur keamanan seperti Babinsa dan Satpol PP untuk memantau kawasan agar terhindar dari pembangunan pemukiman ilegal yang merusak lingkungan pesisir.
- c. **Edukasi Kolektif:** Menggerakkan warga di tingkat RT untuk menjaga kebersihan kawasan mangrove dari limbah domestik, meskipun perilaku membuang sampah sembarangan masih ditemukan pada sebagian kelompok masyarakat.

### 4.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

#### 1. Faktor Koordinasi

Koordinasi antar-stakeholder merupakan faktor pendukung utama. Pemerintah Desa Waiheru menjalin hubungan intensif dengan instansi eksternal seperti **KPH Suli, Dinas Kehutanan, dan BKSDA** melalui pertemuan formal maupun informal. Sinergi ini memudahkan desa dalam menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan kawasan lindung.

#### 2. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan mencakup larangan tegas terhadap pembangunan pemukiman atau perumahan di area mangrove. Selain itu, pengelolaan kawasan wisata kini telah diserahkan secara resmi kepada **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** untuk dikelola secara profesional. Namun, keterlambatan pengesahan Perdes yang masih dalam tahap perencanaan menjadi hambatan dalam penguatan legitimasi kebijakan tersebut.

#### 3. Faktor Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran merupakan faktor determinan yang masih bervariasi secara spasial. Penduduk yang tinggal di **wilayah pesisir pantai memiliki pemahaman yang lebih dalam** mengenai urgensi mangrove sebagai penahan abrasi dan badai. Sebaliknya, sebagian warga di wilayah daratan menunjukkan sikap apatis dan kurang menyadari dampak degradasi mangrove terhadap

<sup>1)</sup> Suleman Watianan: *Dosen Prodi. Sosiologi Fak. FISIP Unpatti Ambon*

<sup>2)</sup> Clemantina. Oh. M. Rumus, *Dosen Prodi. Fak. FISIP Unpatti Ambon*

ekosistem desa secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi edukasi berkelanjutan masih sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi seluruh lapisan masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai peran Pemerintah Desa Waiheru dalam pengelolaan hutan mangrove, dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi pemerintahan telah berjalan melalui tiga dimensi utama dengan dinamika yang bervariasi. Dalam kapasitasnya sebagai regulator, pemerintah desa dinilai telah cukup baik dalam melakukan sosialisasi aturan perlindungan hutan dan memanfaatkan kearifan lokal melalui lembaga adat Kewang, meskipun secara formal Desa Waiheru belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) definitif karena masih dalam tahap perancangan. Sebagai fasilitator, pemerintah desa telah memberikan kontribusi nyata berupa kemudahan izin penelitian bagi lembaga pendidikan, penyediaan bibit mangrove, serta promosi produk ekonomi kreatif, walaupun terdapat temuan bahwa masyarakat masih mengharapkan fasilitasi yang lebih bersifat bantuan barang modal secara langsung. Sementara itu, peran sebagai mobilisator telah dijalankan secara aktif melalui penggerakan partisipasi warga dan kelompok pemuda dalam kegiatan penanaman massal, namun fungsi pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan dan penebangan liar masih memerlukan peningkatan konsistensi. Keberhasilan pengelolaan ini didukung secara kuat oleh faktor koordinasi eksternal yang intensif dengan instansi terkait serta kebijakan strategis yang melarang pembangunan di kawasan lindung, namun efektivitasnya tetap terhambat oleh disparitas tingkat kesadaran masyarakat, di mana warga non-pesisir cenderung memiliki pemahaman yang masih minim akan urgensi pelestarian mangrove. Guna mengoptimalkan pengelolaan hutan mangrove di masa depan, disarankan agar Pemerintah Desa Waiheru segera mempercepat proses pengesahan Peraturan Desa yang memuat ketentuan tegas serta sanksi hukum mengikat agar dapat ditaati oleh seluruh elemen masyarakat secara konsisten. Pemerintah desa juga hendaknya meningkatkan kualitas fasilitasi dengan memberikan akses bantuan teknis dan penyuluhan yang lebih detail kepada kelompok pengelola mangrove guna meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

Dalam menjalankan peran mobilisator, pengawasan terhadap kawasan lindung perlu dilakukan secara lebih rutin dan berkala dengan melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas dalam menjaga kebersihan ekosistem dari limbah domestik. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal untuk sinkronisasi petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan, yang dibarengi dengan program edukasi lingkungan berkelanjutan untuk menyamakan persepsi seluruh warga desa mengenai manfaat ekologis dan ekonomi dari kelestarian hutan mangrove. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan ekosistem mangrove di Desa Waiheru dapat menjadi aset lingkungan yang lestari dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

---

1) Suleman Watianan: *Dosen Prodi. Sosiologi Fak. FISIP Unpatti Ambon*

2) Clemantina. Oh. M. Rumus, *Dosen Prodi. Fak. FISIP Unpatti Ambon*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afriyani, Asia, et al. (2017). “Keanekaragaman Vegetasi Hutan Mangrove di Pulau Payung Sungsang Banyuasin Sumatera Selatan.” *Jurnal Lahan Suboptimal*, 6(2).
- Agustino, Leo. (2008). “Pembangunan Daerah dalam Era Reformasi.” *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).
- Amal, dan Baharuddin, I. I. (2016). “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.” *Jurnal Scientific Pinisi*, 2(1), 1–7.
- Anam, D. S. (2021). *The Role of the Regional Government in the Development of Lombang Beach Tourism, Sumenep Regency*. Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Arief, A. (2003). *Hutan Mangrove (Fungsi dan Manfaatnya)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Aswenty, Musbihatin. (2021). *Keanekaragaman Mangrove di Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Petangoran, Gebang, Teluk Pandan, Pesawaran*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Bengen, D. G. (2002). *Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya*. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB.
- Buwono, Yanuar Rustrianto, et al. (2015). “Potensi Fauna Ekosistem Akuatik Hutan Mangrove di Kawasan Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi.” *Ekotropik*, 9(2), 28–33.
- Cecil, C. B., Dulong, F. T., et al. (2003). *Observations on Climate and Sediment Discharge in Selected Tropical Rivers, Indonesia*.
- Dahuri, Rokhmin. (2003). *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwijowijoto, R. N., dan Wrihatnolo, R. R. (2006). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Latuconsina, Husain. (2011). “Ikti fauna di Habitat Mangrove Pantai Waiheru–Teluk Ambon Dalam.” *Berkala Penelitian Hayati*, 7, 59–67.
- Notoatmodjo, Suhaimin Taidin. (2008). *Meningkatkan Kesadaran yang Tinggi*.
- Patilima, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pietersz, Janson H., Reinhard Pentury, dan Prulley A. Unepetty. (2022). “Keanekaragaman Gastropoda Berdasarkan Jenis Mangrove pada Pesisir Pantai Desa Waiheru.” *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 18(2), 103–109.
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997.
- Siagian, S. P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sihombing, Lesro Matua. (2022). *Peranan Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Administratif kepada Masyarakat Desa Lae Pinang*. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

---

<sup>1)</sup> Suleman Watianan: Dosen Prodi. Sosiologi Fak. FISIP Unpatti Ambon

<sup>2)</sup> Clemantina. Oh. M. Rumus, Dosen Prodi. Fak. FISIP Unpatti Ambon

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Amiruddin, et al. (2002). “Analisis Kesesuaian Lahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir Teluk Balikpapan.” *Jurnal Pesisir dan Lautan*, 4(3), 1–16.

---

<sup>1)</sup> Suleman Watianan: *Dosen Prodi. Sosiologi Fak. FISIP Unpatti Ambon*

<sup>2)</sup> Clemantina. Oh. M. Rumus, *Dosen Prodi. Fak. FISIP Unpatti Ambon*